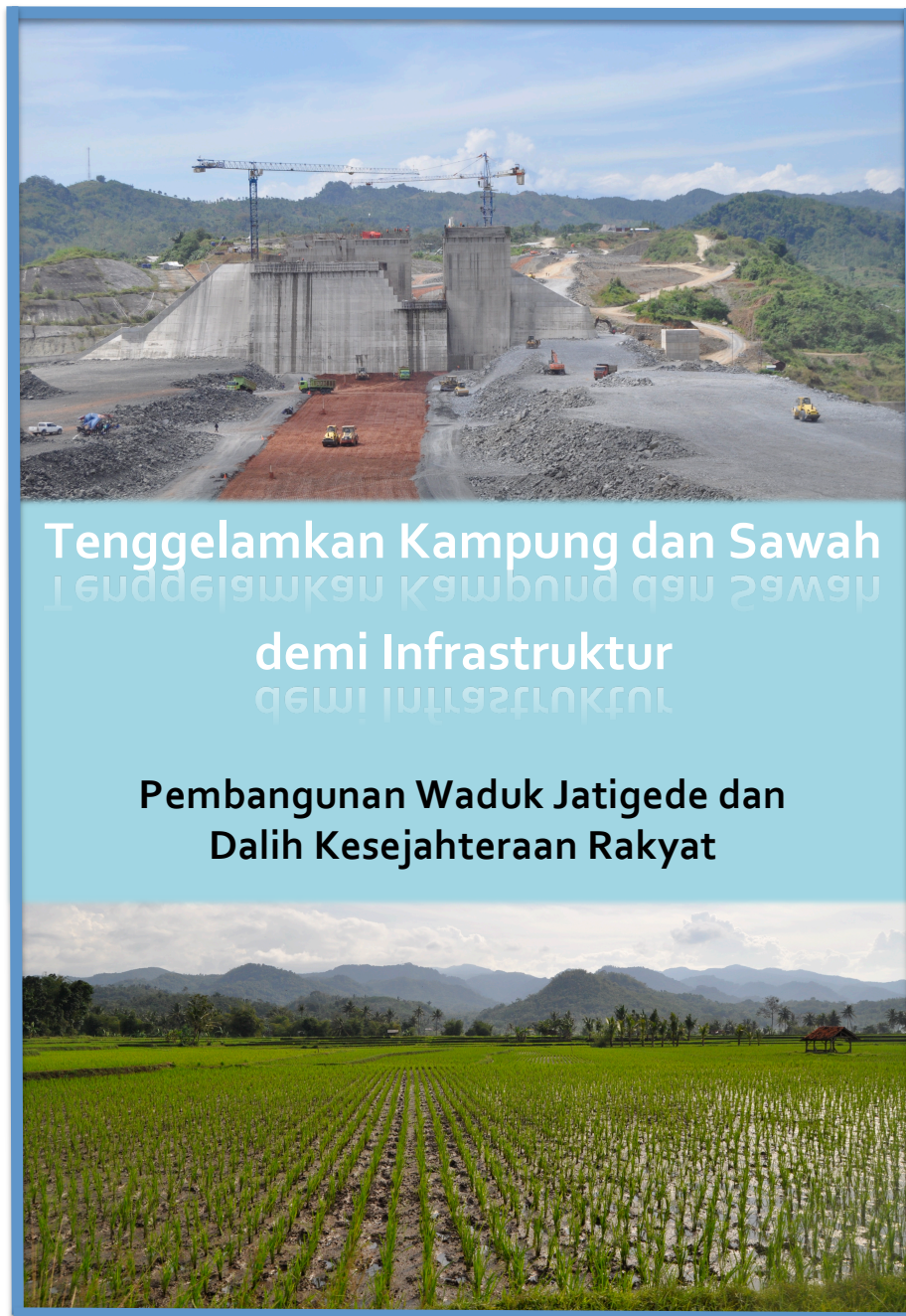


**Seri Working Paper**  
**Kebijakan Agraria dan Pembangunan Pasca Orde Baru**  
**No. 11/WP-KAPPOB/I/2017**

**Lina Marina**  
**Rahmi Indriyani**  
**Hilma Safitri**





**Seri Working Paper**  
**Kebijakan Agraria dan Pembangunan Paska Orde Baru**  
**Vol. 1**

*editor seri,*  
**Dianto Bachriadi**

Seri *Working Paper* Kebijakan Agraria dan Pembangunan Paska Orde Baru menyajikan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh ARC terkait dengan kebijakan agraria dan pembangunan di Indonesia paska otoritarianisme Orde Baru. Seri ini menampilkan tulisan-tulisan hasil penelitian yang terbaru maupun tulisan lama dalam tema terkait yang belum pernah diterbitkan maupun yang sudah pernah dipublikasi dalam kesempatan lain tetapi relevan dijadikan bagian dari seri *working paper* ini.

Seri *working paper* ini dipersembahkan untuk mengenang (Alm.) Tri Agung Sujiwo (1975-2015). Penerbitan seri ini didukung oleh **CCFD – Terre Solidaire, Perancis**

Tulisan ini awalnya adalah makalah disampaikan pada Simposium Internasional ke-6 Jurnal Antropologi Indonesia, bertema “Post-Reform Indonesia: the Challenges of Social Inequalities and Inclusion”, FISIP Universitas Indonesia, Depok, 25-28 Juli 2016.

Satu deskripsi tentang kondisi empiris yang lebih lengkap mengenai rencana pembangunan Waduk Jatigede telah diterbitkan oleh ARC dalam bentuk *working paper* tersendiri: Rohman, Lina Marina dan Rahmi Indriyani (2016) *Pembangunan DAM Jatigede: Beberapa Catatan Awal*, ARC Working Paper No. 001/Agustus 2016. Bandung: ARCBooks.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KTD)

Marina, Lina, Rahmi Indriyani dan Hilma Safitri

**Tenggelamkan Kampung dan Sawah demi Infrastruktur: Pembangunan Waduk Jatigede dan Dalih Kesejahteraan Rakyat**

Seri working paper Kebijakan Agraria dan Pembangunan Paska Orde Baru, Vol. 1,

No. 11/WP-KAPPOB/I/2017

Cetakan 1, Bandung: ARC, 2017

10 hlm; 21 x 29,5 cm

**ISSN 2541-0121**

*layout & setting: penkee*

*Foto untuk cover adalah kegiatan pembangunan konstruksi utama waduk Jatigede dan satu area persawahan yang kemudian menjadi bagian dari genangan waduk. Kedua foto dibuat oleh Tri Agung Sujiwo (alm.), 2015.*



Jalan Ski Air No. 20, Arcamanik, Bandung 40293, INDONESIA

+62 - 22 - 7237799

[arc.indonesia@gmail.com](mailto:arc.indonesia@gmail.com)

[www.arc.or.id](http://www.arc.or.id)



Lina Marina  
Rahmi Indriyani  
Hilma Safitri

# **Tenggelamkan Kampung dan Sawah demi Infrastruktur:**

Pembangunan Waduk Jatigede dan Dalih Kesejahteraan Rakyat

Working Paper ARC  
11 /WP-KAPPOB/II/2017

Agrarian Resources Center  
2017



## Daftar Isi

Sekilas tentang Rencana dan Pelaksanaan Pembangunan Waduk Jatigede	1
Listrik dan Air untuk Siapa?	4
Pertumbuhan (Ekonomi) Sebagai Tujuan	5
Kesimpulan: Pertumbuhan Ekonomi vs Kesejahteraan Rakyat	8
Rujukan	9



**K**ebijakan pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang,<sup>1</sup> diindikasikan akan menghasilkan angka pertumbuhan yang baik tetapi tidak berarti menaikkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitar proyek pembangunan besar. Pemikiran Arthur Lewis (2008) tentang pertumbuhan ekonomi mengatakan pertumbuhan hanya dapat bertumpu pada produktivitas yang relatif bergantung pada keberadaan jumlah tenaga kerjanya. Namun, pada kenyataannya, pertumbuhan di beberapa pengalaman hanya dilihat dari kondisi surplus yang tidak penting itu milik siapa, sehingga cirri-cirinya adalah jika secara agregat terindikasi kenaikan angka pertumbuhan, maka tidak akan demikian jika dilihat dari masing-masing individu. Didalam wacana kapitalisme, ketika upah buruh naik, tidak sama dengan terjadi penurunan angka kemiskinan, bahkan akan terus memperparah kondisi ketimpangan upah. Sekilas yang dikatakan oleh Lewis di atas bisa saja terjadi sebagai dampak dari pembangunan waduk Jatigede, karena walaupun tertulis akan menanggulangi masalah banjir yang sekaligus akan mengatasi krisis air dan listrik di wilayah sekitarnya, pembangunan waduk Jatigede sesungguhnya hanya menargetkan stabilitas angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir rentang 2011-2025. Paling tidak, bisa diurai satu persatu mengapa fenomena itu bisa terjadi, yaitu dengan melihat pelaksanaan pembangunan waduk ini dilihat dari sisi peran negara dalam pembangunan ekonomi dan melihat lebih jauh tentang konsep pertumbuhan apa yang dianut di dalam pelaksanaan MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Kedua hal tersebut, yaitu peran negara dan konsep pertumbuhan menjadi kerangka analisis untuk melihat kasus pembangunan waduk Jatigede di dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi Indonesia.

### **Sekilas tentang Rencana dan Pelaksanaan Pembangunan Waduk Jatigede**

Rencana dan pelaksanaan pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat sudah dimulai sejak tahun 1960-an<sup>2</sup> dan akhir tahun 2014 yang lalu, rencana ini berhasil

---

<sup>1</sup> Satu deskripsi kondisi empiris yang lebih lengkap mengenai rencana pembangunan Waduk Jatigede dapat dilihat pada Rohman, Lina Marina dan Rahmi Indriyani (2016) *Pembangunan DAM Jatigede: Beberapa Catatan Awal*, ARC Working Paper No. 001/Agustus 2016. Bandung: ARCBooks.

<sup>2</sup> Pemerintah Indonesia memulai rencananya bersamaan dengan sejumlah pembangunan waduk yang lain yang berada di Jawa Barat untuk mengembangkan gagasan pembangunan DAS Cimanuk pada tahun 1963. Sejumlah rencana pembangunan waduk dan irigasi pada tahun 1960-an, misalnya pada tahun 1956 dilaksanakan Proyek Rehabilitasi Irigasi pertama di Indonesia, yang dilaksanakan di 3 daerah di Jawa, yaitu di Cisdane (Jawa Barat), Rentang (Jawa Barat) dan Glapan Sedadi (Jawa Tengah), yang didanai oleh IBRD (IBRD, 1975); tahun 1962, Departemen Irigasi, Kementerian PU dan Tenaga Kerja melakukan investigasi awal tentang kemungkinan pembangunan waduk yang membendung Sungai Cimanuk, yang diproyeksikan untuk mengairi sawah seluas 90.000 ha dan mengurangi kerusakan akibat bencana banjir (Anderson, 1966); tahun 1964, Proyek Cimanuk yang dilaksanakan antara tahun 1964-1967, oleh Coyne et Bellier, PT Indah Karya dan Dept PU. Kemudian

direalisasikan dibawah pemerintahan Presiden Jokowi-JK (Setkab RI 2015). Rencana pembangunannya diawali dengan rencana pengembangan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk<sup>3</sup> pada tahun 1963, yang diperkuat dengan hasil penelitian seorang geolog Amerika yang mengindikasikan kelayakan wilayah untuk pembangunan waduk (Geological Survey 1966). Kemudian diperkuat dengan rekomendasi hasil penelitian yang dilakukan oleh konsultan teknis dari Belanda (NEDECO), Snowy Mountains Engineering Corporation (SMEC) pada tahun 1973 (Colenco Power Engineering LTD & PT Indra Karya 2000), sekaligus merupakan rangkaian studi kelayakan yang diprakarsai oleh Bank Dunia yang dokumennya selesai pada tahun 1975. Hal ini yang mendasari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengeluarkan keputusan tentang status wilayah untuk pembangunan bendungan dan waduk Jatigede pada tahun 1975<sup>4</sup>.

Waduk Jatigede sejak awal inisiatifnya akan memenuhi empat tujuan yang tidak hanya akan bermanfaat bagi rakyat dan wilayah pertanian di kabupaten Sumedang saja, melainkan di kabupaten-kabupaten disekitarnya juga. Waduk Jatigede yang dibangun di Kabupaten Sumedang ini menenggelamkan 26 desa yang berada di kecamatan Jatigede, Darmaraja, Wado, Jatinunggal dan Cisitu (berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 1/2015, pasal 1)<sup>5</sup>. Waduk ini, sebagaimana yang tertera dalam Perpres No. 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Waduk Jatigede, akan memberikan manfaat yang besar bagi ekonomi dan sosial berupa irigasi, penyediaan air baku, pembangkit listrik tenaga air, dan pengendalian banjir serta manfaat lainnya bagi masyarakat. Waduk ini akan mengairi sawah-sawah yang ada di wilayah utara Jawa Barat sekaligus untuk menanggulangi banjir yang kerap kali terjadi di wilayah yang sama. Posisinya sangat strategis di lokasi cekungan dimana wilayah aliran sungai Cimanuk berada, yaitu di wilayah Jatigede yang meliputi 5 kecamatan dan 28 desa.

---

dilanjutkan dengan pengajuan proyek untuk rehabilitasi sistem irigasi di Rentang (Colenco Power Engineering LTD & PT Indra Karya, 2000); 1968, proyek rehabilitasi sistem irigasi di Jawa dan penyelesaian sistem irigasi baru di Sumatera Selatan (IDA, 1968; IBRD, 1968); 1969, Proyek irigasi di Cirebon (89.000 Ha) dan Rentang (92.000 Ha) (The World Bank, 1975; IBRD, 1975; IBRD, 1975).

<sup>3</sup> “DAS Cimanuk merupakan salah satu penopang utama sumberdaya air di Jawa Barat. Luas DAS Cimanuk sebesar 3.493 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi tiga bagian DAS, yaitu sub-DAS Cimanuk Hulu, sub-DAS Cimanuk Tengah dan sub-DAS Cimanuk Hilir (Gambar 6.107.). Cimanuk hulu memiliki luas 145.677 Ha berada di Kabupaten Garut dan Sumedang. Mata Airnya berasal dari Situ Cipanas. DAS Cimanuk Tengah memiliki luas 114, 477 Ha berada di Kabupaten Sumedang dan Majalengka. DAS Cimanuk Hilir memiliki luas 81.299 Ha berada di wilayah Indramayu.” (PPE Regional Jawa NA)

<sup>4</sup> Perda No.293/AI/2/T.Pra/75 tanggal 26 September 1975, yang kemudian diperbarui tahun 1981 dan 2000.

<sup>5</sup> Yaitu 5 desa di Kecamatan Jatigede (Desa Jemah, Desa Ciranggem, Desa Mekarasih, Desa Sukakersa dan Desa Cijeungjing); 2 desa di Kecamatan Jatinunggal (Desa Sirnasari dan Desa Pawenang); 4 desa di Kecamatan Wado (Desa Wado, Desa Padajaya, Desa Cisurat, dan Desa Sukapura); 13 desa di Kecamatan Darmaraja (Desa Cipaku, Desa Pakualam, Desa Karangpakuan, Desa Jatibungur, Desa Sukamenak, Desa Leuwihideung, Desa Cibogo, Desa Sukaratu, Desa Tarunajaya, Desa Ranggon, Desa Neglasari, dan Desa Darmajaya); 4 desa di Kecamatan Cisitu (Desa Pajagan, Desa Cigitung, Desa Cisitu, Desa Situmekar).

Ide utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas produksi pertanian Indonesia, yang salah satunya terkonsentrasi di wilayah Jawa Barat, khususnya bagian utara. strateginya adalah memanfaatkan aliran sungai Cimanuk yang bermuara di laut Jawa di wilayah Cirebon dan Indramayu. Waduk Jatigede ini berada di wilayah aliran sungai Cimanuk (Daerah Aliran Sungai Cimanuk/DAS Cimanuk), yang pemeliharaannya sudah dicanangkan sejak tahun 1960-an, dimana waduk Jatigede menjadi salah satu strategi untuk tujuan pemeliharaannya. Misalnya untuk pemeliharaan di wilayah Rentang (Cirebon), dilakukan sejak tahun 1964 (Colenco Power Engineering LTD & PT Indra Karya 2000, 2-3). Mengingat pentingnya pemeliharaan irigasi ini, maka sejumlah pendanaan diusahakan dengan keterlibatan beberapa lembaga keuangan internasional (IDA 1968, 2-3, IBRD 1968, 1 dan 5). Termasuk Bank Dunia yang menggelontorkan dana pinjamannya pada tahun 1969 (The World Bank 1975, IBRD 1975, Annex 4, IBRD 1975, 8). Yang terus berlanjut hingga tahun 1980-an dengan atau tanpa pinjaman Bank Dunia dengan berbagai cara, misalnya pembangunan tanggul-tanggul penahan banjir serta saluran irigasi untuk mengairi wilayah persawahan di daerah Cirebon dan Indramayu (Proyek Irigasi yang didanai oleh Bank Dunia hingga akhir dekade 1980-an<sup>6</sup>).

Sejak awal gagasan pembangunan waduk Jatigede muncul sudah ada perdebatan para ahli geologi terkait dengan layak atau tidaknya waduk dibangun di lokasi tersebut. Studi kelayakan yang dibuat oleh Lembaga Geologi Indonesia mengindikasikan bahwa pembangunan waduk Jatigede hanya akan berhasil jika memenuhi prasyarat lainnya yang harus dipenuhi. Waduk Jatigede sangat potensial jika sebelumnya dibangun sejumlah waduk kecil untuk menunjang efektivitas bekerjanya waduk (Anderson 1966), sehingga pada tahun 1963, Presiden Soekarno pun hanya mampu merealisasikan Pembangkit Listrik tenaga Turbin sebagai alternatif untuk mengatasi persoalan irigasi di wilayah utara Jawa Barat (Tim Penyelesaian Dampak dan Pengosongan Waduk Jatigede 2013). Walaupun demikian, akhirnya Waduk Jatigede tetap direalisasikan dan dimulai dengan penyiapan instrument kebijakan untuk memuluskan proses persiapannya. Dimulai dengan penetapan lokasi pembangunan waduk, melalui Perda No. 293/AI/2/T.Pra/75 tanggal 26 September 1975 (yang diperbarui tahun 1981 dan 2000) (LBH Bandung 2003) dan instrumen pelapasan hak atas tanah yang selama ini menjadi lahan garapan dan pemukiman warga, yang sejalan dengan proses pembebasan lahan yang dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahun 1982-1986 dengan landasan hukum pembebasan lahannya Permendagri No. 15/1975, lalu tahun 1990-an dengan Keppres No. 55/1993, dan terakhir pada era pemerintahan Jokowi, dimulai dengan Perpres No. 36/2005

---

<sup>6</sup> IBRD 1975, IBRD 1968, IBRD 1975, IDA 1968, The World Bank 1982, World Bank 1978, World Bank 1978.

(diperbarui Perpres No. 65/2006) dan terakhir Perpres No. 1/2012 yang diperkuat dengan Perpres No. 1/2015 tentang Penanganan Dampak sosial pembangunan waduk Jatigede.

### **Listrik dan Air untuk Siapa?**

Inti dari dibangunnya proyek waduk Jatigede adalah pemenuhan sarana infrastruktur, baik listrik, air bersih dan saluran irigasi, oleh negara dalam rangka memberikan layanan kepada rakyatnya. Di banyak negara, termasuk negara maju, khususnya yang diupayakan melalui waduk Jatigede adalah sektor-sektor vital dan harus diupayakan untuk dikuasai negara (Meggison & Netter, 2001). Hal ini dilakukan sebagai fondasi untuk dijalkannya roda perekonomian negara secara keseluruhan sekaligus untuk tetap dapat memberikan pelayanan dasar kepada rakyatnya. Namun, walau bagaimanapun, fondasi seperti apa yang dibangun, tidak terlepas dari faktor-faktor kepentingan para pemegang otoritas di dalam tubuh pemerintahan yang menjadi representasi negara. Dalam penentuan dilaksanakannya pembangunan waduk Jatigede ini, pemerintah juga menggarisbawahi seluruh penilaian dan nilai lebih akan meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi pada tahun 2020 (Coordinating Ministry of Economic Affairs 2011). Hal ini bisa terjadi karena dipertimbangkan akan mendatangkan banyak investor dan keleluasaan berinvestasi dengan tanpa ada hambatan masalah infrastruktur penyediaan sarana listrik dan air. Pertumbuhan ekonomi dengan pondasi pembangunan ekonomi pertanian rakyat kemudian hilang dari pilihan karena laju pertumbuhannya dinilai sangat lambat. Padahal, pada masa Orde Lama, masa pemerintahan Soekarno, pertimbangan ini mengemuka sehingga pada saat itu ide pembangunan waduk tidak dilanjutkan.

Perbedaan fokus perhatian rejim pemerintahan terhadap ide pembangunan waduk Jatigede ini sangat terkait dengan pandangan tentang peran negara. salah satunya adalah pandangan bahwa negara merupakan alat bagi sekelompok dominan untuk mencapai tujuannya. Pandangan ini berbeda dengan pandangan Weberian, dimana negara sebagai sebuah institusi di dalam pemerintahan yang berbeda dan berjarak dengan masyarakatnya (Weber, 1947, pp. 35, 326; Geuss & Skinner, N/A, pp. 17-18), pandangan ini melihat negara sebagai instrument yang bisa melanggengkan rencana-rencana bisnis dan ekonominya untuk melakukan akumulasi capital dengan atau tidak mengatasnamakan tujuan kesejahteraan bangsa (Marx, 1897, pp. 96-98; Mouffe, 1979, p. 10). Kedua pandangan tersebut berevolusi atau muncul di masing-masing negara dengan latar belakang kondisi ekonomi dan geografis yang berbeda-beda dan pada dasarnya keduanya sama-sama sedang menjalankan tugas permanen

negara yaitu untuk memfasilitasi akumulasi capital dan/atau untuk mengkondisikan legitimasi politik di tataran yang paling minimal (Harvey, 2010, p. 51; Grindle, 1986).

Fokus pembangunan waduk ini adalah menyumbang suplai listrik yang memadai untuk mengembangkan sektor industri yang dibangun di pulau Jawa. Konsepsi 'DMI' atau *domestic-municipal-industry* menjadi titik pijak penting untuk menjalankan proyek ini (Colenco Power Engineering LTD & PT Indra Karya 2000, 1-1). Proyek yang ditujukan mengupayakan ketersediaan air bersih, listrik dan distribusi air untuk wilayah pertanian, ditujukan untuk kebutuhan rumah tangga (domestik), kebutuhan kota dan pemenuhan tuntutan industri. Namun, hal ini perlu diperhatikan angka statistik yang disediakan oleh PLN, dimana rasio elektrifikasi di pulau Jawa sudah mencapai 76% pada tahun 2011 (PLN 2012, 5 dan 20, H. Safitri 2014, 39). Artinya, sektor listrik untuk kebutuhan rumah tangga tidak perlu harus membangun waduk Jatigede dengan skenario penyediaan tenaga listrik antara 175 MW hingga 200 MW, seperti yang direncanakan oleh pemerintah sejak awal (Colenco Power Engineering LTD & PT Indra Karya 2000, 12-6). Bahkan, strategi pemenuhan tenaga listrik oleh PLN, untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, cukup diupayakan dengan pembangkit tenaga listrik alternatif, misalnya pembangkit listrik dengan kincir angin atau teknologi lain yang bisa diupayakan sendiri oleh rakyat (PLN 2012). Dengan demikian, logika untuk pemenuhan kebutuhan listrik domestik bukan menjadi tujuan dari dibangunnya waduk Jatigede ini, termasuk untuk kebutuhan *municipal*.

Satu-satunya target yang ingin dicapai adalah untuk pemenuhan tenaga listrik untuk kebutuhan industri. Sejak dicanangkannya konsep pembangunan ekonomi koridor di era pemerintahan SBY, pulau Jawa bagian utara merupakan wilayah yang menjadi prioritas untuk pengembangan sektor industri manufaktur (Safitri 2012). Karena itu, upaya penyediaan seluruh sarana infrastruktur, termasuk tenaga listrik menjadi prioritas. Kebijakan pembangunan ekonomi serupa masih dilanjutkan di era pemerintahan Jokowi saat ini, bahkan rejim saat ini sudah lebih leluasa menjalan konsep-konsep yang sudah sangat panjang dirumuskan oleh para ahli pembangunan yang berwatak neoliberal. Pergantian rejim pemerintahan tidak mengubah watak untuk membangun ekonomi nasional, karena mereka (pemerintahan dari rejim ke rejim) hanya memperhatikan angka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan terus meningkat.

### **Pertumbuhan (Ekonomi) Sebagai Tujuan**

Pembangunan ekonomi yang salah satu strateginya adalah membangun waduk raksasa, memperlihatkan bekerjanya capital mendominasi arah pembangunan dan kegiatan-kegiatan

ekonomi yang ada. Teori dasar tentang pertumbuhan klasik yang dikenal dengan *Subsistence-Capitalism* (Lewis, 2008, p. 142) akan membantu bagaimana pembangunan waduk Jatigede ini akan sangat penting dalam corak pembangunan yang kapitalistik. Target pembangunan waduk Jatigede ini akan menciptakan kondisi kompetisi upah buruh yang memadai, yang pada akhirnya akan menekan biaya produksi seluruh perputaran modal yang dikehendaki. Ketika seluruh sumberdaya sudah terkonsentrasi, baik sumberdaya tanah dan sumberdaya ekonomi rakyat di sekelompok orang tertentu, maka akan menjadi kondisi disyaratkan untuk berjalannya roda kapitalisme dibawah rejim pemerintahan yang neoliberal (Safitri, 2012). Kondisi inilah yang memungkinkan terciptanya pertumbuhan ekonomi dengan parameter tingginya transaksi ekonomi.

Tujuan pembangunan waduk ini untuk mengatasi masalah banjir di pantai utara Jawa sejak awal sudah terbantahkan. Waduk ini kemudian akan mematikan potensi pertanian potensial wilayah yang direncanakan (sekitar 100 ribu hektar (Colenco Power Engineering LTD & PT Indra Karya 2000, 2-19). Perdebatan tentang hal ini menjadikan sulit direalisasinya proyek ini, dan menjalankan berbagai alternatif proyek untuk mengatasi banjir yang terus menerus melanda wilayah Cirebon dan Indramayu, yang memanfaatkan DAS Cimanuk (The World Bank 1975, 8, IBRD 1975, 8). Walaupun demikian, proses pemberian kompensasi kepada sejumlah warga di 5 kecamatan tetap dijalankan, yaitu pada tahun 1982-1986, 1994-2000 (Colenco Power Engineering LTD & PT Indra Karya 2000, 3-4), sebelum akhirnya diberikan dana 'kerahiman' pada tahun 2015 (Perpres No. 1/2015).

Target lainnya adalah penyediaan tenaga listrik, air baku dan sarana irigasi di sekitar lokasi waduk Jatigede. Seperti sudah diuraikan diatas, penyediaan tenaga listrik ditujukan bukan untuk keperluan rumah tangga, melainkan untuk memenuhi tuntutan para pelaku industri (KP3EI Jawa 2012) yang memang difokuskan dikembangkan di pulau Jawa. Lagi-lagi, pertimbangan dasarnya tidak dengan melihat rasio elektrifikasi, melainkan berpijak pada beban puncak pemakaian listrik (*peak load*), yaitu antara jam 18.00 -19.00, yang seringkali menyulitkan para pelaku industri (Colenco Power Engineering LTD & PT Indra Karya 2000, 6-2). Beban puncak ini disebabkan karena pada saat yang bersamaan, pemakaian listrik di sektor rumah tangga juga meningkat, dan akan mengakibatkan terhambatnya produksi industri yang sedang ditargetkan untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi. Begitu juga untuk pemenuhan air baku dan air irigasi di wilayah-wilayah sekitar waduk Jatigede. Wilayah-wilayah yang sulit air khususnya di wilayah utara, Cirebon dan Indramayu. Merekalah wilayah utama penerima manfaat waduk Jatigede ini (Colenco Power Engineering LTD & PT Indra Karya 2000, 8-3 - 8-5).

Hal ini yang akan menggiring analisis bahwa “kesejahteraan rakyat” hanya dalih untuk memuluskan bekerjanya ekonomi kapitalistik dengan politik pembangunan waduk Jatigede. Kembali merujuk pada konsep *subsistence capitalism*-nya Lewis (2008), maka hal ini akan menggiring pada penyediaan tenaga kerja yang cukup ketika seluruh prasyarat berjalannya roda kapitalisme bisa dipenuhi, sebagaimana dijelaskan oleh David Harvey tentang *capital circulation* (2010; 2005; 2003). Terutama dengan fenomena terakhir, dimana rejim Jokowi-JK kemudian memutuskan untuk memberikan apa yang disebut ‘dana kerahiman’ kepada seluruh warga yang masih tinggal di wilayah waduk Jatigede. Hal ini diputuskan dengan asumsi bahwa sejumlah warga yang sudah diidentifikasi bisa menerima dana ini adalah mereka yang sudah pernah menerima dana ganti rugi di tahun 1980-an dan 1990-an, sehingga nilainya tidak sepadan dengan asset yang mereka miliki hingga tahun 2015 (Rp. 29 juta dan Rp. 122 juta, berdasarkan Perpres No. 1/2015). Kebijakan pemberian *dana kerahiman* ini akan mengarah pada penumpukan sejumlah orang yang bergantung hidupnya pada kebutuhan tenaga kerja yang ada di sekitarnya.

Mereka yang menerima ‘dana kerahiman’, pada umumnya, tidak bisa memenuhi kebutuhan mendesak untuk tempat tinggalnya dan bekal untuk memulai memenuhi kehidupan ekonomi selanjutnya. Berbagai strategi diupayakan oleh warga yang terdampak untuk bisa bertahan hidup. Hingga saat ini, masih sulit untuk melihat kecenderungan warga yang sudah pindah dari lokasi waduk Jatigede. Karena mereka yang pada umumnya adalah petani atau yang terbiasa bekerja di sektor pertanian, perlu membangun relasi sosial yang baru di lokasi dimana mereka tinggal. Pada saat ini, proses penyingkiran masyarakat secara sosial semakin menjadi, dimana mereka mulai dijauhkan dari akar sosial-budayanya sebagai masyarakat petani (Hall, Hirsch and Li 2011) sekaligus juga dijauhkan aksesnya dari alat produksinya (Ribot and Peluso 2003). Proses ini memerlukan banyak waktu, karena penduduk setempat yang juga adalah masyarakat petani, sudah membangun relasi sosialnya sendiri untuk mengembangkan strategi penghidupannya masing-masing.

Di sisi lain, faktor eksternal yang didorong oleh corak pembangunan ekonomi yang tidak berpijak pada kegiatan ekonomi yang berpusat pada rakyat, terus mendesak hingga masyarakat pertanian akan tergerus dan hilang. Baik warga Jatigede dan warga setempat akan bertransformasi menjadi kumpulan orang yang disiapkan untuk masuk ke sektor industri, termasuk industri pertanian. Seiring dengan berpindahnya sumberdaya tanah kepada sekelompok pemodal untuk mengubah pola produksi pertanian warga menjadi bisnis pertanian, atau agroindustri. Pola ini akan terus berlanjut, khususnya di Jawa, seiring dengan fokus pembangunan di pulau Jawa adalah sektor industri (H. Safitri 2012). Dengan demikian,

salah satu komponen vital untuk dijalankannya pembangunan bercorak kapitalistik akan lebih lancar, yaitu ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif dan murah (Furtado & Girvan, 1973).

### **Kesimpulan: Pertumbuhan Ekonomi vs Kesejahteraan Rakyat**

Kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia, sejak era Orde Baru hingga saat ini tidak mengalami perubahan, yaitu menjalankan paham neoliberalisme untuk dijalankannya corak produksi yang kapitalistik. Hal ini ditunjukkan dengan dinamika dalam perencanaan, perdebatan dan direalisasikannya proyek pembangunan waduk Jatigede. Masa pemerintahan Orde Lama masih mempertimbangkan keuntungan dan kerugian proyek ini bagi masyarakat setempat dan masyarakat di sekitarnya. Sementara rejim Orde Baru dan yang saat ini berkuasa, hanya memperhatikan bagaimana proyek ini bisa berkontribusi pada naiknya angka pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara kondisi kesejahteraan rakyat, dalam hal ini, direpresentasikan dari angka-angka yang muncul dalam kenaikan angka pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Namun, dengan paham neoliberalisme untuk dijalankannya corak produksi yang kapitalistik ini tidak akan memeplihatkan kecenderungan yang sama di tingkat nasional dan lokal. Dalam kasus pembangunan waduk Jatigede ini saja, kecenderungan bahwa warga yang terdampak tidak akan segera bisa diberikan jaminan hidupnya pada masa sekarang dan masa depan sangat terlihat. ‘Dana kerahiman’ adalah salah satu indikasinya. Selain itu, analisis tentang angka kesejahteraan dengan melihat angka pertumbuhan ekonomi nasional, tidak bisa mewakili seluruh wilayah di Indonesia. Karena strategi yang dijalankan adalah strategi wilayah prioritas, dalam hal ini pulau Jawa, yang diharapkan bisa berkontribusi sangat tinggi untuk menaikkan angka pertumbuhan ekonomi nasional. Jika kasus mikro di sekitar waduk Jatigede saja sudah menunjukkan kondisi ketidak-sejahteraan bagi rakyatnya, maka sulit untuk mengatakan bahwa kenaikan angka pertumbuhan ekonomi nasional sama dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat Indonesia.

§

## Rujukan

- Anderson, Reed J. (1966) *Recent Faulting at Proposed Damsites in the Eretan Area, West Java, Indonesia*. Vols. Geological Survey Professional Paper 550-C, in *Geological Survey Research 1966 (Chapter C)*, by US Department of the Interior. Washington: US Government Printing Office.
- Colenco Power Engineering LTD & PT Indra Karya. (2000) "Jatigede Multipurpose Reservoir Project: Project Implementation Preparation Review Study." *Main Report*. Jakarta: Ministry of Settlement and Regional Development, the Govt of the Republic of Indonesia.
- Coordinating Ministry of Economic Affairs. *Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development*. Edited by Coordinating Ministry For Economic Affairs Deputy Minister for Coordinating Infrastructure and Regional Development. Jakarta: Coordinating Ministry For Economic Affairs, 2011.
- Furtado, Celso, and Cherita Girvan. (1973) "The Brazilian 'Model'." *Social and Economic Studies* 22, no. 1, March, pp. 122-131.
- Geological Survey. (1966) *Geological Survey Research 1966-Chapter C*. Geological Survey Professional Paper. 550-C, Washington DC: United States Department of The Interior.
- Geuss, Raymond, and Quentin Skinner, (N/A). *Weber: Political Writings*. Vol. Cambridge Texts in the History of Political Thought. Cambridge: Cambridge.
- Grindle, Merilee S. (1986) *State and Countryside: Development Policy and Agrarian Politics in Latin America*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Hall, Derek, Philip Hirsch, and Tania Murray Li. (2011) *Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*. Singapore: NUS Press.
- Harvey, David. (2005) *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford: Oxford University Press.
- (2010) *The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism*. New York: Oxford University Press.
- (2003) *The New Imperialism*. New York: Oxford University Press.
- IBRD. (1975) *Indonesia Irrigation Program Survey*. Report No. 705-IND, East Asia and Pacific Projects Department, Irrigation and Area Development Division, International Bank for Reconstruction and Development.
- (1968) "Irrigation Rehabilitation Project Indonesia." *Report No. 568a*. International Bank for Reconstruction and Development/International Development Association, August 14.
- (1975) "Loan Agreement: Sixth Irrigation Project." International Bank for Reconstruction and Development, April 10.
- (1975) "Proposed Loan for A Sixth Irrigation Project." *Report and Recommendation of the President of the IBRD (No. P-1580-IND)*. International Bank for Reconstruction and Development, March 20.
- IDA. (1968) "Proposed Development Credit for an Irrigation Rehabilitation Project." *Report and Recommendation of the President (Report No. P-629)*. International Development Association, August 21.
- KP3EI Jawa. "Hasil Kunjungan Lapangan Industri Prioritas 2011-2012: Inventarisasi Persoalan dan Kebutuhan Investor." Vers. Rapat Koordinasi KP3EI. *MP3EI Koridor Jawa*. MP3EI Koridor Ekonomi Jawa. February 29, 2012. mp3ei.info (accessed August 28, 2012).

- LBH Bandung. (2003) *Mengungkap Pelanggaran HAM, Hukum dan Korupsi di Bendungan Jatigede SUmedang, Jawa Barat (Sebuah Laporan Alternatif)*. Bandung: LBH Bandung.
- Lewis, Arthur. (2008) "Economic Development with Unlimited Supplies of Labor." *The Manchester School* 22, no. 2, pp. 139-191.
- Marx, Karl. (1897) *The Eighteenth Brumaire of Louis Napoleon*. Translated by DDL. New York: Dodo Press.
- Meggison, William L, and Jeffrey M Netter. (2001) "From State to Market: A Survey of Empirical Studies on Privatization." *Journal of Economic Literature* 39, no. 2 pp. 321-389.
- Mouffe, Chantal. (1979) "Introduction: Gramsci Today." In *Gramsci and Marxist Theory*, 1-18. London, Boston and Henley: Routledge & Kegan Paul.
- PLN. (2012) *Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2012-2021*. Jakarta: PT PLN Persero.
- . (2012) *Statistik PLN 2011*. Jakarta: PT. Perusahaan Listrik Negara.
- PPE Regional Jawa. *DAS Cimanuk*. NA. <http://ppejawa.com/ekoregion/das-cimanuk/> (accessed April 6, 2015).
- Ribot, Jesse C, and Nancy Lee Peluso. (2003) "A Theory of Access." *Rural Sociology* 68, no. 2, pp. 153-181.
- Safitri, Hilma. (2014) *Debottlenecking dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)*. Bandung: ARC Books.
- Safitri, Hilmayati. (2012) *Economic Corridor Policy, Land Concentration and 'Social-Exclusion': Java's Economic Corridor Policy Implementation, Indonesia*. Research Paper for obtaining the degree of MA in Development Studies, Agriculture and Rural Development, Institute of Social Studies, The Hague: ISS.
- Setkab RI. "Terdampak Pembangunan Waduk Jatigede, Warga 28 Desa Akan Diberikan Rumah Pengganti." *Sekretariat Kabinet RI*. Januari 9, 2015. <http://setkab.go.id/terdampak-pembangunan-waduk-jatigede-warga-28-des-a-kan-diberikan-rumah-pengganti/> (accessed Januari 9, 2015).
- The World Bank. (1975) *Appraisal of Irrigation Project VI Indonesia*. Report No. 595-IND, East Asia and Pacific Projects Department, The World Bank, Washington: The World Bank.
- . (1982) "Indonesia: Sixteenth Irrigation Project." *Staff Appraisal Report No. 3649-IND*. Washington: The World Bank.
- . (1975) "Proposed Loan to the Republic of Indonesia for a Sixth Irrigation Project." *Report and Recommendation of the President to the Executive Directors (Report No. P-1580-IND)*. Washington: The World Bank.
- Tim Penyelesaian Dampak dan Pengosongan Waduk Jatigede.(2013) "Pernyataan Sikap OTD Waduk Jatigede." *Penuntasan Dampak Sosial Waduk Jatigede*.
- Weber, Max. (1947) *Max Weber: The Theory of Social and Economic Organization*. Edited by Talcott Parsons. Illinois: The Free Press & The Falcon Wing Press, 1947.
- World Bank. (1978) "Indonesia: Irrigation XI." *Staff Appraisal Report*. World Bank.
- . (1978) "Loan Agreement: Eleventh Irrigation Project." World Bank.

## **Penulis**

### **Lina Marina**

Sarjana Sosiologi lulusan Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung. Menjadi peneliti junior di Agrarian Resources Center (ARC) tahun 2015-2017.

### **Rahmi Indriyani**

Sarjana Sosiologi lulusan Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung. Menjadi peneliti junior di Agrarian Resources Center (ARC) tahun 2015-2017.

### **Hilma Safitri**

*Pendiri dan Peneliti Agrarian Resource Center (ARC).*

Pernah menjadi staf di Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan PERGERAKAN – People-centered Advocacy Institute. Saat ini selain menjadi peneliti juga Koordinator ARC. Meminati kajian agraria dan pembangunan, serta sejarah perdagangan komoditas pertanian. Menulis buku ‘*Debottlenecking* dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan EKonomi Indonesia’ (MP3EI)” (ARC Books, 2014). Menyelesaikan pasca sarjana di Program Studi Pembangunan, International Institute of Social Studies (ISS) The Hague, Belanda.



## Agrarian Resources Center (ARC)

Lembaga kajian sosial independen yang dibentuk tahun 2005 oleh sejumlah aktivis-pemikir agraria di Indonesia. Lembaga ini dibentuk untuk mengisi kekosongan kerja-kerja penelitian dan kajian kritis di bidang agraria, khususnya yang dilakukan oleh peneliti-peneliti muda. Juga dimaksudkan untuk menjadi tempat bagi aktivis-aktivis gerakan sosial melakukan refleksi atas kerja-kerja mereka dalam mendorong perubahan sosial. Hasil kajian ARC terutama didedikasikan sebagai masukan kritis untuk kelompok-kelompok gerakan sosial baik di pedesaan maupun perkotaan, selain untuk memberikan sumbangan kepada kajian-kajian agraria kritis. Publikasi hasil-hasil kajian ARC disebarikan dalam berbagai bentuk, seperti: *working paper*, *position paper*, buku, dan artikel-artikel lepas untuk tujuan publikasi di jurnal-jurnal ilmiah maupun untuk diskusi, seminar dan konferensi.

Selain melakukan sejumlah kajian dan refleksi, ARC juga menyelenggarakan pelatihan kajian agraria kritis secara reguler yang dikhususkan untuk mahasiswa dan peneliti-peneliti muda. Program pelatihan ini dinamakan “Pelatihan Kajian Agraria Kritis Indonesia” atau “Critical Agrarian Studies of Indonesia” (CASI). Pelatihan dilakukan secara intensif dengan skema dukungan penuh lembaga dalam bentuk *fellowship* dan disusun berjenjang dari tingkat dasar hingga tingkat lanjutan. Di luar pelatihan terstruktur, ada program Peneliti Tamu (*visiting researcher*) ARC yang diselenggarakan untuk memberi kesempatan khususnya kepada para aktivis gerakan sosial untuk melakukan refleksi dan menuliskan pengalamannya, serta memberi kesempatan kepada peneliti muda dari berbagai latar belakang ilmu sosial untuk mengembangkan minat dan memperluas pengalamannya dalam mengkaji masalah-masalah agraria di Indonesia. Peneliti tamu akan bekerja bersama peneliti-peneliti ARC untuk mendalami gagasan-gagasan dan ide-ide penelitian dan penulisan yang akan digarapnya selama berada di ARC.

ARC memiliki perpustakaan yang menyimpan koleksi ribuan buku dan jurnal ilmiah dalam bidang agraria, gerakan sosial, antropologi, sosiologi, politik, geografi, ekologi, ekonomi-politik, hukum, hak asasi manusia, sejarah, filsafat dan lainnya yang terbuka untuk umum. Perpustakaan ini juga menyimpan koleksi data-data hasil penelitian serta dokumen-dokumen yang sesuai dengan perhatian dan minat lembaga. Di perpustakaan ARC secara rutin juga dilakukan diskusi-diskusi dalam tema-tema tertentu, baik untuk menyikapi dinamika sosial-ekonomi-dan politik yang terkait dengan pembangunan dan masalah-masalah agraria maupun untuk mendalami isu-isu ekonomi-politik lainnya.

ARC terbuka untuk kerjasama dengan berbagai pihak, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, selama dapat berpegang pada prinsip-prinsip bekerja bersama untuk mewujudkan keadilan sosial, pembebasan, anti penindasan, independensi, dan kesetaraan.

### Alamat:

Jalan Ski Air No. 20, Arcamanik, Bandung 40293, INDONESIA

Telepon/fax.: +62 - 22 - 7237799

Email: [arc.indonesia@gmail.com](mailto:arc.indonesia@gmail.com)

[www.arc.or.id](http://www.arc.or.id)

## Publikasi-publikasi ARC (terbaru)

### Buku

- Bachriadi, Dianto dan Gunawan Wiradi. *Six Decades of Inequality: Land Tenure Problems in Indonesia*. 2011.
- Bachriadi, Dianto dan Gunawan Wiradi. *Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia*. 2011.
- Bachriadi, Dianto (editor). *Dari Lokal ke Nasional, Kembali ke Lokal: Perjuangan Hak Atas Tanah di Indonesia*. 2012.
- Safitri, Hilma. *Debottlenecking dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)*. 2014.
- Bachriadi, Dianto dan Henry Bernstein. *Kedaulatan Pangan: Pandangan Skeptikal*. 2014.

### Working Paper dan Kertas Posisi

- Bachriadi, Dianto dan Meidi Pratama. *Dijual Tanah! yang Berminat Silahkan Hubungi Pemilik, Seratus Persen Dijamin oleh Pemerintah: Kritik dan Implikasi Pelaksanaan Land Management Policy and Development Project (LMPDP) di Indonesia*, Kertas Posisi ARC No. 001/2006 (Bandung: Agrarian Resources Center). 2006.
- Sujiwo, Tri Agung. *Perubahan Penguasaan Tanah di Atas Lahan Pendudukan Pasca Reformasi (Studi Kasus Tanah Cieceng, Desa Sindangasih Tasikmalaya)*, Working Paper ARC No. 1/2012, Agustus 2012 (Bandung: Agrarian Resources Center). 2012.
- Suryana, Erwin. *Struktur Agraria dan Dinamika Gerakan Sosial Pedesaan di Karawang*, Working Paper ARC No. 2/2012, Agustus 2012 (Bandung: Agrarian Resources Center). 2012.
- ARC, Tim. *Kecenderungan Advokasi Gerakan dan Kebijakan Agraria Nasional Pasca Reformasi*, Working Paper ARC No. 3/2012, Agustus 2012 (Bandung: Agrarian Resources Center). 2012.
- Baihaqi. *Redistribusi Lahan di Cipari Kabupaten Cilacap*, Working Paper ARC No. 4/2012, Agustus 2012 (Bandung: Agrarian Resources Center). 2012.
- Rohman, Lina M. dan Rahmi Indriyani. *Pembangunan DAM Jatigede: Beberapa Catatan Awal*, Working Paper ARC No. 001 – Agustus 2016 (Bandung: Agrarian Resources Center). 2016
- Qorihah, Sityi M. *Masyarakat Dusun Bonto, Desa Kompang, Kec. Sinjai Tengah, Sulawesi Selatan: Catatan Awal*, Working Paper ARC No. 002 – September 2016 (Bandung: Agrarian Resources Center). 2016.

- Bachrioktora, Yudi, Hilma Safitri dan Dianto Bachriadi. ***Pelanggaran yang Disengaja: Maladministrasi di Bidang Pertanahan Warisan Orde Baru***, Working Paper ARC No. 01.a/WP-KAPPOB/I/2017 (Bandung: Agrarian Resources Center). 2017.
- Safitri, Hilma, Dianto Bachriadi dan Yudi Bachrioktora. ***Belok Kanan Demi Kapital: Sistem Hukum dan Kebijakan Agraria di Indonesia sejak Orde Baru***, Working Paper ARC No. 01.b/WP-KAPPOB/I/2017 (Bandung: Agrarian Resources Center). 2017.
- Bachriadi, Dianto. ***Tanah untuk Petani Tak Bertanah***, Working Paper ARC No. 02/WP-KAPPOB/I/2017 (Bandung: Agrarian Resources Center). 2017.
- Bachriadi, Dianto. ***Melihat Kembali ke Belakang: Upaya-upaya Mendorong Terbitnya TAP MPR RI tentang Pembaruan Agraria***, Working Paper ARC No. 03/WP-KAPPOB/I/2017 (Bandung: Agrarian Resources Center). 2017.
- Bachriadi, Dianto. ***Jalan Lain Penyelesaian Konflik Agraria: KNUPKA***, Working Paper ARC No. 04/WP-KAPPOB/I/2017 (Bandung: Agrarian Resources Center). 2017.
- Bachriadi, Dianto. ***Keruk Terus: Tambang di Hutan Lindung***, Working Paper ARC No. 05/WP-KAPPOB/I/2017 (Bandung: Agrarian Resources Center). 2017.
- Bachriadi, Dianto. ***Intervensi Asing: Legislasi Agraria paska Orba***, Working Paper ARC No. 06/WP-KAPPOB/I/2017 (Bandung: Agrarian Resources Center). 2017.
- Bachriadi, Dianto. ***Reforma Agraria untuk Indonesia: Kritik atas Reforma Agraria à la SBY***, Working Paper ARC No. 07/WP-KAPPOB/I/2017 (Bandung: Agrarian Resources Center). 2017.
- Bachriadi, Dianto dan Anton Lucas. ***Trees, Money, Livelihood and Power: The Politics of Conservation in Decentralisation Era in Bengkulu***, Working Paper ARC No. 08/WP-KAPPOB/I/2017 (Bandung: Agrarian Resources Center). 2017.
- Bachriadi, Dianto. ***Penantian Panjang yang Belum Berakhir: Refleksi Satu Dasawarsa Reformasi dalam Perspektif Reforma Agraria***, Working Paper ARC No. 09/WP-KAPPOB/I/2017 (Bandung: Agrarian Resources Center). 2017.
- Basya, Baihaqi. ***Bagi-bagi Tanah untuk Dijual: Implementasi PPAN di Satu Tempat di Jawa Tengah***, Working Paper ARC No. 10/WP-KAPPOB/I/2017 (Bandung: Agrarian Resources Center). 2017.





**11/WP-KAPPOB/I/2017**

**ISSN: 2541-0121**



**ARC**  
*Agrarian Resources Center*

Jalan Ski Air No. 20, Arcamanik, Bandung 40293, INDONESIA

+62 – 22 – 7237799

[arc.indonesia@gmail.com](mailto:arc.indonesia@gmail.com)

[www.arc.or.id](http://www.arc.or.id)